



Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola
Informasi dan
Dokumentasi Provinsi
Jawa Barat
Tahun 2022



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Nasional untuk Negeri. Dokumen digital yang asli dapat diperiksa dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

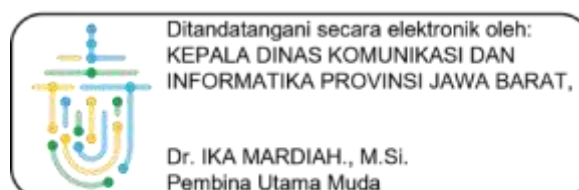
Kata Pengantar

Dengan mengucapkan rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022. LLID disusun sebagai laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pelayanan Informasi kepada publik oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat sepanjang Tahun 2022. Laporan ini memuat gambaran umum kebijakan pengelolaan, pelaksanaan, hingga rekomendasi tindak lanjut pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat.

Hasil Kolaborasi dengan berbagai pihak hingga menghasilkan inovasi-inovasi Pelayanan Informasi Publik, telah mengiringi langkah Kami melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Provinsi Jawa Barat berhasil meningkatkan kualitas Pelayanan Informasi menjadi “Informatif” di Tahun 2022 dari capaian sebelumnya “Menuju Informatif” pada Tahun 2021 dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi PPID Provinsi Jawa Barat ini kami susun. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Perangkat Daerah hingga Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik untuk mempertahankan Provinsi Jawa Barat yang Informatif.

Bandung, Februari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Jawa Barat
selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
LATAR BELAKANG	1
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PROVINSI JAWA BARAT	2
Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat.....	2
Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat	7
Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat.....	8
Melaksanakan fungsi advokasi dan koordinasi dengan PPID Pelaksana.....	12
Melaksanakan fungsi advokasi dan koordinasi dengan PPID Kab/Kota	15
Menjadi Narasumber dalam Kegiatan PPID Kab /Kota	17
Rapat Koordinasi tentang PPID dengan Kementrian / Instansi Lainnya.....	18
Mengikuti Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang KIP	23
Melaksanakan Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang KIP	28
Berpartisipasi dalam Monev KIP	30
Melaksanakan kunjungan kerja terkait PPID.....	35
Pencapaian PPID Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022.....	37
Inovasi dalam Perluasan Akses Informasi Publik.....	39
Tepas Jabar	39
Jabar Punya Informasi (JAPRI).....	40
Desa Digital	41
Sapawarga.....	43
Ekosistem Data Jabar.....	44
Jabar Saber Hoaks	45
Jabar Quick Response	46
Pikobar	47
Sarling Jabar	47
IKP Talks	48
GAMBARAN UMUM DAN REKAPITULASI PELAKSANAAN PELAYANAN PPID.....	49
TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN PPID.....	51
REKOMENDASI PENINGKATAN KUALITAS PPID	50
PENUTUP	51



Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

LATAR BELAKANG

Kebutuhan masyarakat akan informasi melahirkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu indikator penting dari negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Disamping itu, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara.

Undang-Undang KIP memiliki peran untuk mengatur hak dan kewajiban Badan Publik selaku penguasa informasi dan pengambil kebijakan dalam penyelenggaraan negara serta hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik individu maupun kelompok, sebagai pelaku pengguna informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang ini memberikan amanat agar pelayanan informasi publik dilaksanakan secara cepat, tepat waktu, ekonomis dan dengan cara yang sederhana melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik.

Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PP tersebut memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam hal pengelolaan dan akses informasi sekaligus mendorong komitmen yang kuat antara para pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Terkait dengan komitmen tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Keputusan Gubernur Nomor Jawa Barat 489/Kep.487-Diskominfo/2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepgub tersebut yang kemudian direvisi pada tahun 2014 dan 2017. Dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan PPID di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2021 Keputusan Gubernur di atas kembali disesuaikan melalui Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Perubahan terakhir ini dipengaruhi oleh perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat serta kebutuhan akan penguatan payung hukum dalam pembagian tugas antara PPID Utama dan PPID Pelaksana di Provinsi Jawa Barat.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PPID PROVINSI JAWA BARAT

Kebijakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi PPID Provinsi Jawa Barat

Demi terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat membuat Inovasi dan Kolaborasi yaitu Visi yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dr. H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D., sejak awal menjabat. Visi tersebut merupakan inti dari orientasi nilai pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) Misi Pembangunan, yaitu:

- (1) Membentuk manusia pancasila yang bertaqwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban;
- (2) Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif;
- (3) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah;
- (4) Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan; serta
- (5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, Laporan Layanan Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

kelima merupakan fokus kerja PPID Provinsi Jawa Barat. Aspek kolaborasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan diperlukan untuk membuka ruang bagi publik untuk mengakses informasi publik yang interaktif dari masyarakat. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, mulai Tahun 2021 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan penyesuaian payung hukum guna menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik yang sesuai aturan Pemerintah Pusat melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sesuai Keputusan Gubernur di atas, pembagian struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) menjadi dua, yaitu PLID Utama dan PLID Pembantu. PLID Utama terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, PPID Utama, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Penyelesaian Sengketa. Sementara itu, PLID Pembantu terdiri dari Atasan PPID Pembantu, PPID Pembantu, dan 3 (tiga) bidang pendukung yaitu Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, dan Bidang Fasilitas Sengketa Informasi. Atasan PPID Pembantu adalah Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Biro Umum, dan Direktur pada BUMD.

Dalam menjalankan fungsi teknis, PPID Utama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan Layanan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
2. Bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
3. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan bersama dengan Tim Pelayanan Pertimbangan Informasi.

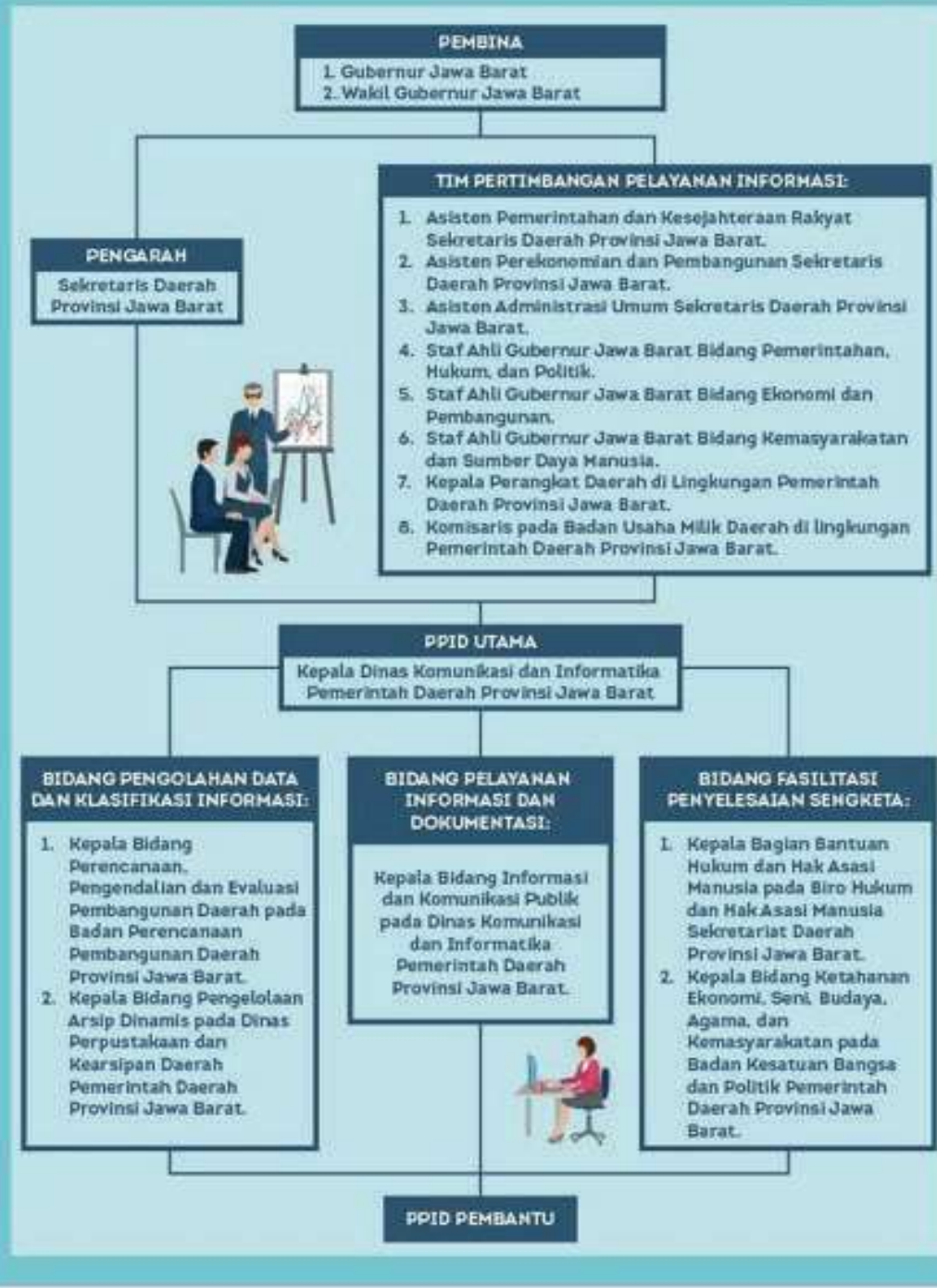
Untuk lebih memahami struktur PPID pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, di bawah ini adalah gambar Struktur Organisasi di halaman berikut.



0D1C280529

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Utama Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

STRUKTUR ORGANISASI

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID) PEMBANTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT



Struktur Organisasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)
Pembantu Provinsi Jawa Barat



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

PPID Utama dan PPID Pembantu mempunyai wewenang untuk mengelola serta melayani informasi publik secara mandiri. PPID utama dan PPID pembantu tetap saling melakukan koordinasi dalam hal pelaporan layanan informasi publik seperti proses layanan informasi publik, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), Uji konsekuensi menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK). PPID Pembantu juga mempunyai tugas untuk melaporkan kepada atasan PPID Pembantu serta kepada PPID Utama.

Adapun tugas dari PPID Utama adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, mendorong, monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan informasi PPID Pembantu. Sedangkan tugas dari PPID Pembantu adalah :

- a. Mengumpulkan bahan informasi dan dokumentasi pada Perangkat Daerah.
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran data di masing-masing unit kerja untuk ditetapkan oleh pimpinan unit kerja pada Perangkat Daerah;
- d. Menyusun laporan pengelolaan pelayanan informasi di setiap unit kerja Perangkat Daerah;
- e. Membentuk petugas pelayanan informasi di unit kerja masing-masing yang meliputi pengelolaan data, kearsipan, dokumentasi, serta kehumasan;
- f. Mengkoordinasikan dan memastikan proses keberatan kepada ketua PPID Pembantu;
- g. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi publik di Perangkat Daerah;
- h. Memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana, terkait permohonan informasi pada Perangkat Daerah;
- i. Membuat informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualian nya sebagai informasi publik yang dapat di akses pada PPID masing-masing unit kerja dan melaporkannya kepada Ketua PPID Pembantu;
- j. Membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi publik;
- k. Menyusun telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- l. Menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Selain layanan informasi publik berdasarkan permohonan dari pemohon informasi, PPID Provinsi Jawa Barat juga memberikan layanan informasi dengan cara menyampaikan/mengumumkan informasi publik secara berkala terkait program - program, kegiatan, hingga pencapaian pembangunan melalui berbagai akses informasi dan komunikasi yang dimiliki. Beberapa akses yang dapat digunakan yaitu website (situs <https://jabarprov.go.id/>, www.humas.jabarprov.go.id, <https://ppid.jabarprov.go.id/>, dan website masing-masing Perangkat Daerah), media sosial (https://www.instagram.com/humas_jabar/, <https://www.instagram.com/-jabarprovgoid/>, dan media sosial lainnya di masing-masing Perangkat Daerah), media luar ruang hingga distribusi informasi/berita (press release) kepada media massa.

Program dan Kegiatan PPID Utama Provinsi Jawa Barat

Terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Keterangan
1	Rapat Koordinasi	11 kegiatan	Rapat Koordinasi dilaksanakan dengan melibatkan dua atau lebih Perangkat Daerah
2	Mengadakan Bimtek/ Workshop/ Webinar	6 kegiatan	Bimtek diadakan dalam rangka pembinaan kepada Perangkat Daerah dan Kab/ Kota
3	Advokasi Perangkat Daerah dan Kab/ Kota	16 kegiatan	Advokasi diberikan kepada Perangkat Daerah dan Kab/Kota dan PPID Utama juga meminta advokasi kepada PD/pihak terkait
4	Menjadi narasumber	6 kegiatan	Menjadi narasumber bagi PD/Kab/Kota/Pihak terkait dalam rangka edukasi pelayanan informasi
5	Mengikuti Bimtek/Workshop/ Webinar	19 kegiatan	Selain melaksanakan bimtek/workshop/webinar tersendiri, SDM PPID juga kerap kali mengikuti bimtek/workshop/webinar yang diadakan oleh instansi lain dalam rangka penguatan kapasitas PPID
6	Melaksanakan kunjungan kerja	7 kegiatan	Kunjungan kerja kepada instansi lain dilaksanakan dalam rangka advokasi dan pembinaan kepada PD/Kab/Kota
7	Menerima kunjungan kerja	21 kegiatan	Menerima kunjungan kerja dari instansi/provinsi lain dilaksanakan dalam rangka studi banding/tiru pelayanan publik di PPID Provinsi Jawa Barat
8	Fasilitasi sidang sengketa	15 kegiatan	Fasilitasi sidang sengketa dilaksanakan sebagai salah satu perwujudan tanggung jawab PPID Utama kepada PPID Pelaksana
9	Demo Handling	14 kegiatan	Demo handling dilaksanakan oleh PPID Utama dalam rangka menerima aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat
10	Kegiatan Instansi lain	16 kegiatan	PPID Utama juga menghadiri berbagai kegiatan instansi lain dalam rangka penguatan kapasitas dan koordinasi dengan pihak/instansi lain



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

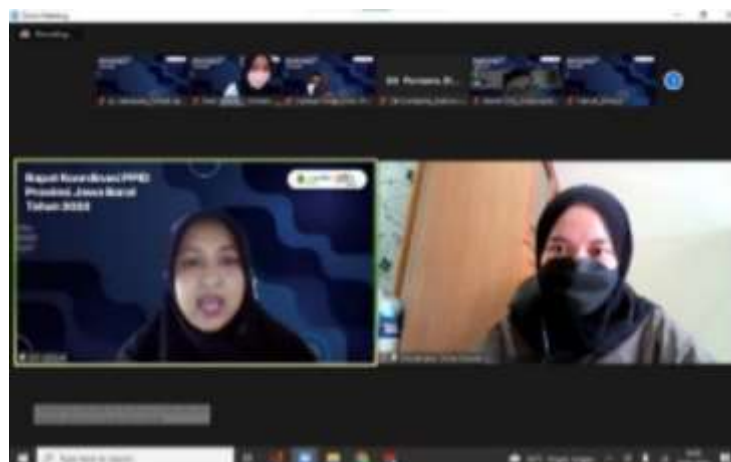
Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat

Rapat Koordinasi PPID Utama Provinsi Jawa Barat dengan PPID Pembantu dari Perangkat Daerah hingga PPID di Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Jawa Barat dilaksanakan secara berkala. Tujuan Rakor PPID yaitu untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi mengenai penyelenggaraan pelayanan informasi PPID untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat. Berikut Kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain :

1. Rapat Uji Konsekuensi bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat via Zoom (Rabu, 12 Januari 2022).



2. Rapat Koordinasi PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 via Zoom (Selasa, 18 Januari 2022).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, Laporan Layanan Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

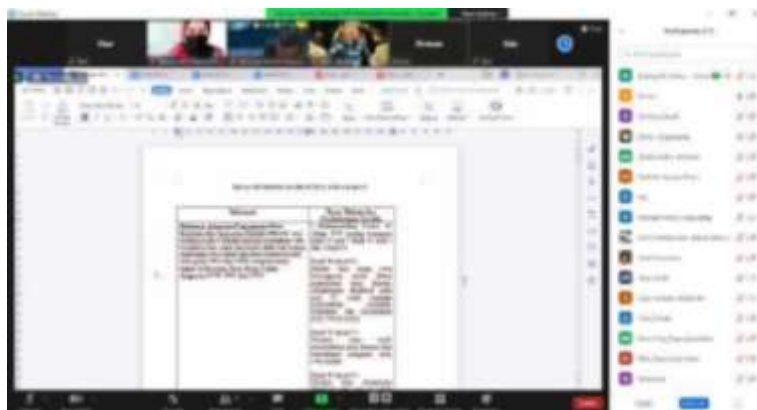
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

3. Rapat Koordinasi dengan Disdik untuk Persiapan penetapan uji konsekuensi via Zoom (Kamis, 20 Januari 2022).



4. Rapat Penetapan Uji Konsekuensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat via Zoom (Jumat, 21 Januari 2022).



5. Rapat Koordinasi dengan KI Provinsi Jawa Barat di (Café Halaman Bandung, 22 Maret 2022).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



7. Koordinasi dan Konsultasi Pengisian Monev Tahun 2022 bersama KI Jabar (Diskominfo Jabar, 13 September 2022).



8. Rapat Koordinasi EMonev bersama Komisi Informasi Jabar (Komisi Informasi Jabar, 5 Oktober 2022).



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, atau memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



10. Koordinasi dengan TU Sekda dan TU Pak Gub dalam persiapan presentasi uji publik Monev KIP Tahun 2022 (Gedung Sate, 28 Oktober 2022).



11. Rapat Koordinasi Lanjutan Persiapan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Jabar Tahun 2022 (Gedung Sate, 5 Desember 2022).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Selain melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, PPID Utama juga melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat selaku PPID Utama memahami bahwa hal tersebut dimaksudkan agar PPID di internal Badan Publik dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik sehingga proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Berikut kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain :

1. Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 6 Januari 2022).



2. Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 10 Januari 2022).





4. Koordinasi permohonan informasi publik bersama PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 7 Maret 2022).



5. Koordinasi PPID Utama dan PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Barat membahas SK PPID Pembantu Diskominfo Provinsi Jawa Barat (Diskominfo Jabar, 24 Maret 2022).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDS, atau dengan cara lain yang dapat diakses melalui tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



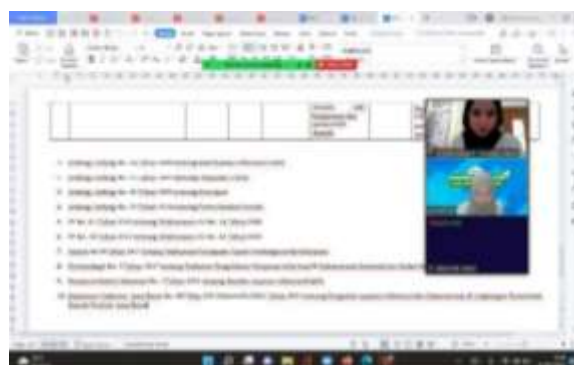
7. Rapat Koordinasi dengan tenaga ahli PPID Pembantu Disdik (Diskominfo Jabar, 26 April 2022).



8. Rapat Koordinasi PPID dengan Bapenda Jabar (Diskominfo Jabar, 18 Mei 2022).



9. Rapat koordinasi pembahasan SOP PPID Pembantu BAPENDA Provinsi Jawa Barat via Zoom (Rabu, 27 Juli 2022).



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Rapat Koordinasi dan rapat kerja berkala dan/atau sesuai kebutuhan juga dilaksanakan oleh PPID Utama Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Hal ini sebagai bentuk ajang bertukar pikiran dan kolaborasi secara berkesinambungan untuk menciptakan pelayanan informasi yang lebih baik lagi. Berikut rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan, antara lain:

1. Menerima Kunjungan Kerja dari Diskominfo Cianjur (Diskominfo Jabar, 10 Januari 2022).



2. Menerima kunjungan kerja Diskominfo Kab Sukabumi (Diskominfo Jabar, 11 Januari 2022).



3. Koordinasi PPID dengan Kabupaten Subang (Gedung Sate, 7 April 2022).



4. Menerima kunjungan kerja dari Diskominfo Kota Sukabumi (Diskominfo Jabar, 23 Mei 2022).





5. Menerima Kunjungan Kerja dari Diskominfo Kab Bandung Barat terkait Konsultasi PPID (Diskominfo Jabar, 5 Desember 2022).



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, atau dengan memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Menjadi narasumber dalam Kegiatan PPID Kab / Kota di Jawa Barat

Menjadi narasumber dalam beberapa kegiatan peningkatan kapasitas PPID di Kabupaten/ Kota di Jawa Barat dilaksanakan dalam rangka menerapkan fungsi pembinaan dan *sharing* terhadap berbagai persoalan mengenai pelayanan informasi publik, selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui mekanisme pelayanan informasi publik serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel di wilayah Jawa Barat. Berikut rangkaian kegiatannya, antara lain:

1. Menjadi narasumber Podcast AA dan UU dan diseminasi informasi terkait PPID (Bandung, 9 Maret 2022).



2. Menjadi narasumber Bimtek PPID Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat via Zoom (Selasa, 29 Maret 2022).



3. Menjadi narasumber Sosialisasi PPID bersama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat via Zoom (Kamis, 4 Agustus 2022).



Rapat Koordinasi tentang PPID dengan Kementrian / Instansi Lainnya

Rapat koordinasi dilaksanakan bersama dengan PPID Pembantu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kab/ Kota. Selain itu, juga dilaksanakan dengan Kementerian/instansi lainnya dalam rangka membina hubungan baik dan ajang *sharing* mengenai pelaksanaan pelayanan informasi di instansi masing-masing. Berikut rangkaian kegiatannya, antara lain :

1. Rapat Pembahasan Draft Revisi PM Kominfo No 8 Tahun 2019 terkait Kemitraan Komunikasi Publik via zoom (Jumat,3 Juni 2022).



2. Kick Off Monev KI Pusat Tahun 2022 (Jakarta,10 Agustus 2022).



3. Menghadiri Sosialisasi Monev KI Jabar dan Launching e-Monev (Gedung Sate, 22 Agustus 2022).



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

4. FGD Penyusunan NSPK Layanan Informasi dan Komunika bagi Penyandang Disabilitas (Senin, 29 Agustus 2022).



5. Menghadiri Rakernis KI Pusat se-Indonesia Tahun 2022 (Gedung Sate, 5 September 2022)



6. Forum Komunikasi dan Koordinasi “Peningkatan Kualitas Demokrasi melalui Keterbukaan Informasi Publik Nasional” ,(Komisi Informasi Pusat ,8 September 2022)



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, Laporan Layanan Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

7. Launching Buku I,II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2022 dan Penerimaan Penghargaan IKIP ,5 Provinsi Terbaik se-Indonesia Tahun 2022 (Bekasi, 22 September 2022)



8. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2022 (Semarang, 12 Oktober 2022)



9. Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia 2022 Part 2 (Semarang, 13 Oktober 2022)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

10. Technical Meeting Persentasi Uji Publik dengan KI Pusat via Zoom (Selasa, 25 Oktober)



11. Pembukaan Monev Presentasi Badan Publik 2022 via Zoom (Senin, 31 Oktober 2022)



12. Presentasi uji publik Monev KIP tahun 2022 Part 2 (Tangerang, 2 November 2022)



13. Malam Penghargaan KPID Tahun 2022 (Bekasi, 2 November 2022)



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, Laporan Layanan Informasi Publik – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

14. Konsultasi publik mengenai NSPK Pelayanan informasi ramah disabilitas via Zoom
(Rabu, 9 November 2022)



15. Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Gedung Sate, 8 Desember 2022)



16. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 (Tangerang, 14 Desember 2022)



Mengikuti Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi Publik

Mengikuti sosialisasi, webinar, maupun bimtek dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan kapasitas petugas PPID. Hal ini dilakukan secara berkala dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan informasi publik melalui penambahan wawasan dan pengalaman dari rekan-rekan PPID di instansi/ Pemerintah Daerah lainnya. Berikut rangkaian kegiatannya, antara lain :

1. Seminar Hasil Indeks PIKP 2021 via Zoom (Senin, 31 Januari 2022)



2. Webinar dengan tema : Pencegahan Korupsi dan Mitigasi Resiko Permasalahan Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa via Zoom (Rabu, 2 Maret 2022)



3. Webinar dengan tema : Seputar Siaran TV Digital : Alasan beralih ke Siaran TV Digital via Zoom (Rabu, 2 Maret 2022)



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, Laporan Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

4. Diseminasi PerKI Standar Layanan Informasi Publik via Zoom (Selasa, 22 Maret 2022)



5. Workshop Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik Nasional via Zoom (Kamis, 24 Maret 2022)



6. Webinar Keterbukaan Informasi Publik via Zoom (Rabu, 6 April 2022)



7. Bimtek Penyusunan Strategi Komunikasi Publik Part 1 via Zoom (Selasa, 7 Juni 2022)



8. Webinar Magnitude dengan tema Bagaimana Mengelola Informasi Rahasia via Zoom (Kamis, 4 Agustus 2022)



9. Webinar “Bagaimana Cara Memperoleh vs Menjawab Permohonan Informasi Publik” via Zoom (Kamis, 18 Agustus 2022)



10. Webinar Konsultasi Publik terhadap Draft Revisi PM Kominfo No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informasi Part 1 via Zoom (Jumat, 28 Agustus 2022)



0D1C280529

11. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi bagi PPID via Zoom (Selasa, 13 September 2022)



12. Webinar Keterbukaan Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dengan tema “Hak Untuk Tahu (Right to Know), Kenali Hak dan Kewajiban Badan Publik dalam Keterbukaan Informasi Publik” via Zoom (Kamis, 29 September 2022)



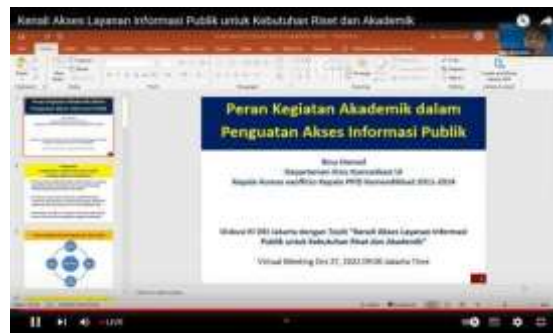
13. Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Tantangan Mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik via Zoom (Kamis, 6 Oktober 2022)



14. Webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Perlindungan Data Pribadi dalam Iklim Keterbukaan Informasi” via Zoom (Kamis, 20 Oktober 2022)



15. Webinar PPID Provinsi Jawa Barat dengan tema Kenali Akses Layanan Informasi Publik untuk Kebutuhan Riset dan Akademik via Zoom (Kamis, 27 Oktober 2022)



16. Webinar dengan tema “Peningkatan Pelayanan Informasi” via Zoom (Kamis, 17 November 2022)



17. Seminar Akses Informasi Publik tanpa “Keterbatasan” Part 1 (Unpad, 6 Desember 2022)



18. Webinar Keterbukaan Informasi Publik ke-33 dengan tema Optimalisasi Pelayanan dan Keterbukaan Informasi Publik Pasca-Pandemi” via Zoom (Kamis, 22 Desember 2022)



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Melaksanakan Sosialisasi, Webinar, Bimtek tentang Keterbukaan Informasi

PPID Utama Provinsi Jawa Barat memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana. Oleh karena itu, untuk mengakomodir kebutuhan PPID dalam meningkatkan wawasan maupun kecakapan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, kami telah menyelenggarakan sejumlah kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia seperti workshop, seminar, dan bimbingan teknis. Berikut rangkaian kegiatannya, antara lain :

1. Bimtek PPID Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Hotel Masonn Pine, 17 Maret 2022)



2. Workshop Uji Konsekuensi PPID Provinsi Jawa Barat (Hotel Savoy Homan, 14 April 2022)



3. IKP Talks Serie 5 dengan tema : “Sengketa Informasi, Siapa takut! Via Zoom (Rabu, 27 April 2022)



4. Uji Konsekuensi Penetan DIK Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Sesi 2 (Gedung Sate, 2 Agustus 2022)



5. Bimbingan Teknis Pengisian Kuesioner e-monev KIP Tahun 2022 (Diskominfo Jabar, 6 September)



6. IKP Talks Series#10 dengan tema Evaluasi Monev Menuju Jabar Informatif 2023 (Rabu, 28 Desember 2022)



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2022 dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat. Monev KIP memiliki 5 (lima) tahapan yaitu Tahap



Sosialisasi, Tahap Pengisian Kuesioner dan Masa Sanggah, Tahap Verifikasi oleh Tim Monev KI Pusat, Tahap Presentasi dan Visitasi. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat informatif dengan poin 98,85 atau terbaik kedua untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia.

Capaian tersebut merupakan lompatan yang luar biasa dari tahun 2021 lalu yang berada di posisi 14 dengan predikat menuju informatif dan poin 88.

Selain itu, Pada tahun 2022, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar) telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi berbasis Elektronik (E-Monev) Tahun 2022 hingga mengumumkan hasilnya melalui Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Jawa Barat pada tanggal 8 Desember 2022 bertempat di Aula Gedung Sate.



E-Monev tersebut diselenggarakan untuk mengapresiasi Badan Publik di Provinsi Jawa Barat yang telah melaksanakan amanah Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik hingga bisa mencapai predikat Badan Publik Informatif. Selain itu, juga diharapkan dapat memotivasi Badan Publik lainnya untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan informasinya.

Monitoring dan Evaluasi dilakukan dalam rangka penerapan 5 (lima) jenis kewajiban yang diamanatkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik, yaitu:

1. Kewajiban menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala,
2. Kewajiban menyediakan informasi publik yang wajib disediakan setiap saat,
3. Kewajiban membentuk dan mendukung keberadaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID),
4. Kewajiban menyusun dan menerapkan standar operasional pelayanan informasi publik, dan
5. Kewajiban mengumumkan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta terkait masa darurat kesehatan pandemi Covid-19.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Hasil Kegiatan

Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang meraih predikat informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Pemerintah Kabupaten Bandung
2.	Pemerintah Kota Cirebon
3.	Pemerintah Kabupaten Sumedang
4.	Pemerintah Kota Tasikmalaya
5.	Pemerintah Kota Bekasi
6.	Pemerintah Kota Bandung
7.	Pemerintah Kabupaten Purwakarta
8.	Pemerintah Kota Depok
9.	Pemerintah Kabupaten Kuningan
10.	Pemerintah Kabupaten Cirebon
11.	Pemerintah Kabupaten Bogor
12.	Pemerintah Kabupaten Pangandaran
13.	Pemerintah Kabupaten Karawang

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Pemerintah Kabupaten Subang
2.	Pemerintah Kota Banjar
3.	Pemerintah Kota Cimahi
4.	Pemerintah Kota Sukabumi
5.	Pemerintah Kabupaten Garut
6.	Pemerintah Kabupaten Majalengka
7.	Pemerintah Kabupaten Ciamis



Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih predikat kurang informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Pemerintah Kabupaten Sukabumi
2.	Pemerintah Kabupaten Bekasi
3.	Pemerintah Kabupaten Indramayu
4.	Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang meraih predikat tidak informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
2.	Pemerintah Kabupaten Cianjur

OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Dinas Pendidikan
4.	Dinas Pendapatan Daerah
5.	Dinas Kesehatan
6.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
11.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil
13.	Dinas Sumber Daya Air
14.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
15.	Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat
16.	Dinas Perkebunan
17.	Satuan Polisi Pamong Praja



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat menuju informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
2.	Dinas Perhubungan
3.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Dinas Kehutanan
5.	Badan Penghubung
6.	Dinas Kelautan dan Perikanan
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

OPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang meraih predikat cukup informatif adalah:

No	Badan Publik
1.	Dinas Tanaman Pangan Holtikultura
2.	Rumah Sakit Paru
3.	Badan Kepegawaian Daerah
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Kemudian, ada 5 OPD yang meraih predikat kurang informatif dan sisanya meraih predikat tidak informatif sesuai penilaian dan verifikasi Tim Penilai Independen dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Adapun Laporan hasil dari E-Monev untuk katagori BUMD sebagai berikut ;
BUMD yang meraih predikat informatif adalah

No	Nama BUMD
----	-----------

Belum ada

BUMD yang meraih predikat menuju informatif adalah

No	Nama BUMD
----	-----------

Belum ada



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

BUMD yang meraih predikat cukup informatif adalah

No	Nama BUMD
1.	PT. Jasa dan Kepariwisata (Jaswita)
2.	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB)

BUMD yang meraih predikat kurang informatif adalah

No	Nama BUMD
1.	PT. Jasa Sarana
2.	PT. Jamkrida

BUMD yang meraih predikat tidak informatif adalah

No	Nama BUMD
1.	PT. Tirta Gemah Ripah
2.	PT. Agro Jabar
3.	PT. Agronesia
4.	PT. Migas Hulu Jabar
5.	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB)
6.	PD. Agribisnis dan Pertambangan
7.	PT. Migas Huilir Jabar



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut:

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Melaksanakan kunjungan kerja terkait PPID

Kunjungan kerja merupakan lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi., biasanya dilaksanakan untuk melakukan studi banding, atau sharing pengalaman terutama dalam pelayanan informasi publik. Selain melakukan kunjungan kerja ke beberapa instansi, PPID Utama Provinsi Jawa Barat juga menerima kunjungan kerja dari berbagai instansi.



Kunjungan Kerja ke Inspektorat Provinsi Jawa Barat perihal Keberatan Informasi
a.n Muhammad Hidayat (21 Mei 2022)



Kunjungan Kerja ke Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat
(6 Juni 2022)





Kunjungan kerja Ke Diskominfo Provinsi Bali
(17 Juni 2022)



Kunjungan kerja ke Diskominfo Kabupaten Cianjur
(21 Juni 2022)



Kunjungan Kerja Ke Sekretariat Daerah Provinsi DI Yogyakarta
(7 September 2022)



0D1C280529



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

PENCAPAIAN PPID PROVINSI JAWA BARAT PADA TAHUN 2022

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Terbaik di Indonesia Tahun 2022



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berhasil meraih posisi teratas provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Terbaik di Indonesia Tahun 2022 dari 34 provinsi. Jabar meraih nilai tertinggi 81,93 disusul Bali 80,99. Sedangkan 32 provinsi lainnya masuk kategori sedang, dan ada satu provinsi kategori buruk. Pencapaian kinerja keterbukaan publik Jabar tahun ini meningkat dari tahun sebelumnya (2021) dilihat dari posisi dan nilai. Pada 2021, Jabar ada di posisi keempat dengan nilai IKIP 78,56. Pencapaian 2022 melampaui nilai IKIP nasional yang baru mencapai 74,43 atau dalam kategori sedang.

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menilai IKIP menggunakan metode yang sama dengan 2021, yaitu melalui pengumpulan nilai yang melibatkan tim Kelompok Kerja IKIP Pusat dan Pokja Daerah di 34 provinsi. Tim Pokja IKIP Pusat terdiri dari Komisioner KI Pusat dan Tim Ahli Pusat, sedangkan Tim Pokja IKIP Daerah terdiri dari Komisioner KI Provinsi dan Tim Pokja unsur eksternal daerah dengan jumlah seluruhnya 238 orang. Pelaksanaan pengumpulan nilai IKIP dilaksanakan melalui kuesioner yang disampaikan Tim Pokja Daerah di setiap provinsi ke 1A provinsi yang terdiri dari sembilan orang, meliputi unsur pemerintah daerah, unsur dunia usaha, unsur akademisi, dan unsur CSO atau LSM di setiap provinsi.

Hasil penilaian kuesioner oleh 9 1A dibahas dalam kegiatan FGD melibatkan Tim IKIP Pusat untuk mendapatkan skor akhir IKIP Provinsi. Hasil dari nilai final IKIP di setiap provinsi dibawa ke pembahasan NAC Forum yang melibatkan 10 1A Nasional eksternal dan 7 1A internal KI Pusat hingga dihasilkan nilai final IKIP Nasional. Metode penyusunan nilai IKIP dibagi dalam lima kategori. Kelima kategori itu masing - masing nilai buruk sekali antara 0-39, nilai buruk 40-59, nilai sedang 60-79, nilai baik 80-89.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529



Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meraih predikat informatif dengan poin 98,85 atau terbaik kedua untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia. Piagam penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jabar Ika Mardiah di Hotel Atria Gading Serpong, Rabu (14/12/2022).

Pemda Provinsi Jabar dalam anugerah tersebut meningkat signifikan dari tahun lalu. Adapun poin Pemda Provinsi Jabar pada tahun lalu sebesar 88 dengan predikat menuju informatif. Peningkatan tersebut tidak lepas dari komitmen Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Setiawan Wangsaatmaja, dalam melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selain komitmen pimpinan, keberhasilan tersebut berkat kolaborasi dan kerja sama yang terjalin dengan perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Komisi Informasi Jabar.



Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR)



Kegiatan Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat (TEPAS JABAR)

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, yaitu mencapai hampir 50 juta jiwa dengan luas wilayah mencapai 3,7 Juta Ha lebih yang secara administrasi terbagi menjadi 27 kabupaten/kota, 626 Kecamatan, 641 Kelurahan dan 5.962 Desa. Dengan jumlah penduduk yang beragam, menuntut pemerintah untuk dapat membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau pengaduan sehingga pemerintah dapat mengetahui dan memetakan berbagai persoalan yang terjadi, kemudian dicarikan solusi melalui kebijakan pemerintah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah membuka ruang komunikasi publik melalui berbagai macam cara, diantaranya dengan menyediakan kanal-kanal aspirasi pengaduan seperti kanal SP4N-LAPORI, Jabar Quick Response (JQR) serta kanal-kanal yang tersebar di masing-masing Perangkat Daerah atau Kab/ Kota lainnya. Namun juga dirasa perlu untuk mendengarkan sekaligus menangkap aspirasi langsung agar setiap persoalan yang terjadi dapat disampaikan secara lebih jelas dan lengkap langsung dari masyarakat yang menghadapi persoalan maupun dari masyarakat praktisi yang terjun langsung di lapangan. Oleh karena itu, pada tahun 2019 Gubernur Jawa Barat meluncurkan program TEPAS JABAR atau singkatan dari Temu Pemimpin untuk Aspirasi Masyarakat Jawa Barat.



Tepas merupakan ruang komunikasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi / pengaduan langsung ke Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pejabat Daerah lainnya. Gubernur / Wakil Gubernur Jawa Barat menerima masyarakat di tepas/teras Gedung Pakuan, berkumpul dan berbincang santai menyampaikan aspirasi atau persoalan dan berdiskusi mencari solusi bersama. Pada tahun 2022, tercatat 4 kali Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengadakan Tepas.

Dalam pelaksanaannya program TEPAS mengangkat tema-tema yang berbeda, antara lain Kebencanaan/ Kedaruratan, Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Pelayanan E-KTP, Lingkungan Hidup, Industri Kreatif dan Kewirausahaan, Perikanan dan Nelayan, Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, Industri dan Perdagangan, Usaha Mikro/Ekonomi Kerakyatan, Ketenagakerjaan, Kebudayaan, Infrastruktur, Pelayanan Publik dan Perijinan Terpadu, dan lainnya.

Tema-tema tersebut dibahas secara bergiliran setiap minggu satu kali, setiap hari Selasa atau disesuaikan dengan jadwal pimpinan. Audien atau peserta TEPAS ini adalah masyarakat terdampak masalah atau masyarakat parktisi dan pakar pemerhati masalah tertentu. Adapun proses pemilihan peserta TEPAS adalah dengan cara pendaftaran online, dimana peserta yang paling lengkap dan *valid* data diri serta paling *urgent* isu yang diaspirasikannyalah yang akan diundang dalam acara TEPAS.

Jabar Punya Informasi (JAPRI)



JAPRI atau Jabar Punya Informasi adalah program *Press Conference* yang diselenggarakan secara rutin dengan mengusung tema/topik kegiatan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Barat. Kegiatan ini berbeda dengan kegiatan *press conference* pada umumnya karena dikemas secara santai dan menarik, dimana peserta yang hadir akan disuguhkan hiburan yang khas dan dilakukan secara *hybrid offline* dan *online*.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Program ini Berperan sebagai jembatan informasi antara pemerintah dengan insan media yang dikemas lebih luwes dan santai, berkonsep dialog antara narasumber dengan rekan-rekan media membahas topik tertentu yang sedang hangat, dan sudah dilakukan sebanyak 22 kali selama tahun 2022. Adapun tujuannya adalah untuk menyebarkan informasi dan atau mengantisipasi adanya berita yang tidak benar atau negatif tentang kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Barat. Dalam pelaksanaannya, JAPRI mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah ditentukan dan disiapkan secara matang oleh narasumber. Dengan begitu diharapkan isu atau tema kegiatan yang diangkat dapat dimuat di media massa sehingga dapat diketahui oleh masyarakat secara luas.



Acara JAPRI (Jabar Punya Informasi)

Desa Digital



Desa digital adalah program pemberdayaan masyarakat desa melalui implementasi internet dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat desa. Program Desa Digital bertujuan untuk membantu desa-desa di Jawa Barat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dengan menerapkan teknologi digital secara mandiri ke dalam mata pencaharian mereka.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Program ini berupaya memastikan semua desa di Jawa Barat terkoneksi dengan internet sehingga warga dapat berkomunikasi dan mengakses informasi yang tersedia dengan nyaman. Program ini juga membantu warga desa untuk mengembangkan literasi digitalnya untuk mendapatkan kapasitas yang mumpuni dalam memanfaatkan teknologi dan memanfaatkan internet untuk memperluas akses informasi yang berimplikasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, termasuk meningkatkan aspek pengelolaan lingkungan, ekonomi, pendidikan, peluang inovasi, dan stabilitas sosial.

Demi mewujudkan kemandirian desa di Jawa Barat, program Desa Digital mengajak akademisi, pelaku usaha, komunitas, hingga masyarakat khususnya di pedesaan untuk turut berkontribusi dalam proses pembangunan infrastruktur, pemanfaatan Internet of Things (IoT), dan berpartisipasi dalam pelatihan literasi digital. Mengusung konsep pentahelix, kini 2205 desa di Jawa Barat telah menjadi penerima manfaat dan 22 mitra telah terhubung untuk berinovasi bersama.



SAPAWARGA



- Program pemberian fasilitas gadget dan platform aplikasi yang dapat mempermudah warga dalam menyampaikan aspirasi, mendapatkan informasi, dan mengakses layanan publik.
- Di tahun 2020, Sapawarga menjadi alat pendukung dalam penyelenggaraan Bansos Provinsi.

Aspirasi

Wahana komunikasi dan penyampaian aspirasi.

Informasi

Berbagi informasi dari portal terpercaya serta memberantas penyebaran berita hoaks.

Bantuan Sosial

Verifikasi dan validasi data calon penerima bansos, membantu 1,9 Juta warga Jabar.

Layanan Publik

Akses informasi persyaratan administrasi hingga layanan kependudukan, seperti Cek Pajak Kendaraan Bermotor.

47.198

hibah smartphones untuk Ketua RW

39.539

Jumlah Pengguna

Dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan dan pemerataan informasi untuk wargi Jawa Barat, sejak 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat meluncurkan aplikasi Sapawarga sebagai portal layanan secara digital. Aplikasi ini hadir memudahkan komunikasi antar warga dan pemerintah. Lewat Sapawarga, warga dapat mengakses ragam layanan publik, mendapatkan informasi aktual, serta menyampaikan aspirasi dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.

Adapun misi pengembangan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah penyampaian aspirasi berupa saran, keluhan, dan ide dari masyarakat kepada institusi yang tepat secara responsif; penyampaian berita dan informasi layanan program pemerintah, hingga info kedaruratan teraktual bagi masyarakat; serta mengefisiensikan dan memperluas akses layanan publik.



Jabar Super Apps sebagai platform yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, layanan serta menyampaikan aspirasi



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Ekosistem Data Jabar



Ekosistem Data Jabar merupakan portal terintegrasi untuk pengelolaan, keterbukaan, dan kemudahan akses data yang berkualitas dan mutakhir bagi warga dan pemerintah Jawa Barat. Di sini, warga dan pemerintah Jawa Barat juga bisa berkolaborasi dalam program layanan data yang berkelanjutan. Ekosistem Data Jabar terdiri dari ragam produk dan portal utama, meliputi: Satu Data, Open Data, Satu Peta dan Core Data yang saling terhubung sebagai ekosistem data di Jawa Barat. Data yang disediakan terstandar, akurat, dan diupdate secara berkala. Adapun Fitur terbaru dari Ekosistem Data Jabar yaitu Dashboard Jabar.

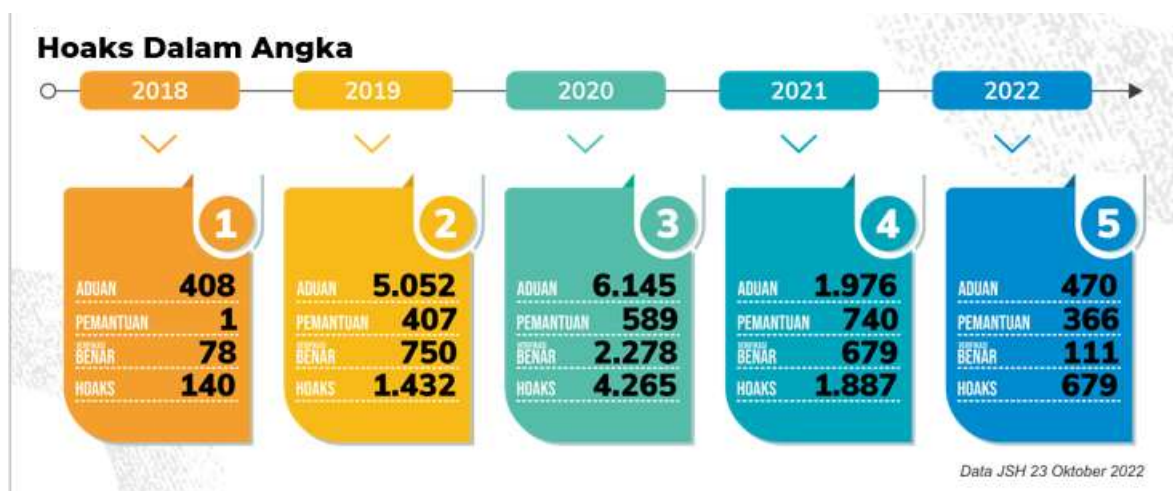


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



Masyarakat Jawa Barat pada khususnya perlu peningkatan literasi digital, kemampuan kritis menerima dan menyebarkan informasi serta kesadaran akan keberadaan hoaks. Pemerintah Daerah Jawa Barat secara aktif hadir memberikan pendidikan penggunaan media sosial yang bijak dan layanan yang mengklarifikasi dan melakukan pengecekan fakta atas isu dan informasi yang beredar di masyarakat.



Tim Jabar Sapu Bersih Hoaks (JABAR SABER HOAKS) memiliki tugas melaksanakan urusan pemberantasan informasi keliru (hoaks) secara efektif dan efisien, khususnya hoaks yang beredar di wilayah Jawa Barat dan/atau hoaks yang terkait dengan Jawa Barat. Adapun fungsi dari tim Jabar Saber Hoaks adalah pelaksanaan pemantauan berkala terhadap ragam topik/isu populer di masyarakat (ruang publik), layanan klarifikasi terhadap setiap aduan atau laporan dari masyarakat atas suatu informasi yang diragukan kebenarannya, diseminasi klarifikasi atas suatu informasi keliru pada kanal-kanal resmi organisasi, dan pelaksanaan edukasi literasi digital secara berkala kepada masyarakat, baik yang diselenggarakan secara *online* maupun *offline*.

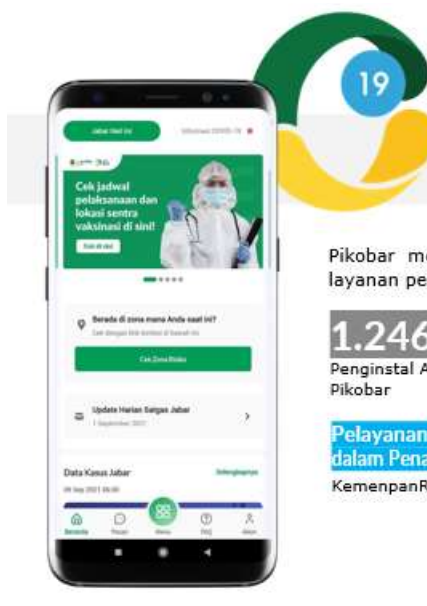




Jabar Quick Response adalah kanal aduan kemanusiaan bagi masyarakat Jawa Barat. Jabar Quick Response hadir untuk memberikan solusi atau pertolongan pertama bagi permasalahan yang bersifat kemanusiaan dan darurat. Terdapat 9 (sembilan) kanal pengaduan diantaranya kesehatan, pendidikan, disabilitas, kebencanaan, rumah darurat roboh, sekolah darurat roboh, rumah ibdaha, jembatan darurat, dan yatim piatu. Tahun 2022 JQR membantu penggalangan dana untuk warga yang terdampak Gempa di Kabupaten Cianjur.



Pikobar (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat)



PIKOBAR

Selang 1 hari setelah Jawa Barat dideklarasikan situasi darurat Covid-19, JDS meluncurkan *Website* Pikobar. 16 hari kemudian, aplikasi Pikobar dirilis.

Pikobar menyediakan data secara *real-time* dan layanan penanganan Covid-19 yang terintegrasi.

1.246.882 Penginstal Aplikasi Pikobar	6.605.049 Pengakses <i>Website</i> Pikobar
Pelayanan Publik Terbaik dalam Penanganan Covid-19 KemenpanRB, 2020	Special Award for Resiliency IDC Digital Transformation Awards (DX) 2020

32 Fitur, termasuk:

Layanan multivitamin, obat, dan oksigen secara gratis bagi **17.478** warga Jabar & **17.006** layanan telekonsultasi.

Pusat Informasi & Koordinasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar) dibuat berselang dua hari setelah penetapan situasi darurat Covid-19 di Jawa Barat. Gubernur Ridwan Kamil meresmikan Pikobar sebagai portal dan aplikasi terpercaya untuk dapatkan informasi Covid-19 dan layanan kesehatan pendukung kedaruratan pandemi, 24/7. Lebih dari 32 aplikasi telah dikembangkan dalam Pikobar dan terhimpun dalam; *Pikobar Communication Response*, *Public Participation Hub*, dan *Pikobar Health System*.

Sarling Jabar



Sarling Jabar adalah kegiatan monitoring lokus yang terdiri dari Pasar, Posyandu, PAUD, Sekolah, tempat pelatihan UMKM/OPOP, tempat Wisata, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar berkolaborasi dengan berbagai *stakeholder* termasuk perangkat daerah di 27 kabupaten/kota se-Jabar. Selama Tahun 2022, Sarling telah dilaksanakan sebanyak 3 kali di Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, dan Kabupaten Ciamis yang bertujuan untuk membangun masyarakat peduli akan kesehatan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan yang merata.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529

IKP Talks



IKP Talks merupakan Langkah dalam meningkatkan kerja sama strategis di bidang komunikasi antar Humas di Jawa Barat. Kemudian fungsi lainnya adalah melakukan manajemen daam bidang informasi dan komunikasi yang persuasif, efektif dan efisien untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publik melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra serta reputasi yang positif bagi instansi pemerintah, di mana hal tersebut tercantum dalam Permen PAN RB 30 Tahun 2011. IKP Talks juga menjadi wadah komunikasi antar pranata humas.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidshar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Laporan Layanan Informasi Publik - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

0D1C280529



Gambaran Umum dan Rekapitulasi Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Namun semenjak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2017, PPID Utama Provinsi Jawa Barat melakukan penyesuaian SOP sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri tersebut. Sedikitnya terdapat 6 (enam) SOP yang disusun oleh PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Penanganan Pernyataan Keberatan;
3. SOP Fasilitasi Sengketa Informasi;
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik;
5. SOP Pengecualian Informasi Secara Aktif;
6. SOP Pengecualian Informasi Secara Pasif;

Serta 2 (dua) SOP yang disusun oleh Bidang Kearsipan dan Klasifikasi Informasi atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah selaku anggota PPID Utama, yaitu:

1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
2. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.

PPID Provinsi Jawa Barat melayani permohonan informasi publik setiap hari kerja mulai pukul 09.00 hingga pukul 15.00 dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Senin-Kamis dan pukul 11.00 hingga pukul 13.00 pada Hari Jumat. Jangka waktu penyelesaian permohonan informasi adalah 10 (sepuluh) hari kerja ditambah satu kali 7 (tujuh) hari kerja apabila diperlukan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

Berdasarkan rekapitulasi Layanan Permohonan Informasi Publik pada PPID Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, terdapat 88 (delapan puluh delapan) permohonan informasi publik yang terdaftar. Tahun 2022 ini, seluruh permohonan informasi publik pada PPID Utama ditanggapi dengan baik, dengan pemohon informasi sebagian besarnya merupakan kategori individu.

Dalam pemenuhan dokumen, tidak seluruh pemohon informasi mendapatkan dokumen yang dimohonkan. Beberapa dokumen informasi yang dimohon tidak berada di bawah kekuasaan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Karena hal tersebut pula, sebagian pemohon merasa tidak puas sehingga mengajukan keberatan walaupun pada akhirnya tetap ditanggapi bahwa dokumen informasi yang dimohon tidak dikuasai dan mengarahkan untuk memohon kepada Badan Publik terkait.



Bulan	Jumlah Permohonan Informasi Publik	Kategori Pemohon		
		Individu	Badan Hukum	Kelompok
Januari	4	4	0	0
Februari	9	9	0	0
Maret	6	6	0	0
April	12	12	0	0
Mei	7	7	0	0
Juni	7	7	0	0
Juli	1	1	0	0
Agustus	2	2	0	0
September	10	8	1	1
Oktober	6	6	0	0
November	10	10	0	0
Desember	14	14	0	0
TOTAL	88	86	1	1

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik
PPID Utama Provinsi Jawa Barat Tahun 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Adapun rekapitulasi layanan permohonan informasi publik kepada PPID Provinsi Jawa Barat, baik PPID Utama maupun PPID Pembantu adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

No	Nama Instansi	Jumlah Permohonan	Permohonan			Alasan Ditolak	Ratas Waktu Jawab
			Diberikan	Sebagian	Ditolak		
1	Inspektorat	0	0	0	0	–	0
2	Badan Kepegawaian Daerah	18					
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	0	0	0	–	0
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	15					6,5
5	Badan Pendapatan Daerah	110	105	0	5	Data dikuasai pihak lain	3
6	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	2	2				6,5
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	5	3	0	2	Data dikuasai pihak lain	5
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	0	0	0	–	0
9	Badan Penghubung	51	51	0	0		1
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36					
11	Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	8					
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99	15				6
13	Dinas Kehutanan	2	2	0	0		
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	5					
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0	0	0	–	0
16	Dinas Kesehatan	46	46	0	0		4,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

17	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	289	289	0	0		
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	0	0		7
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil	40	40	0	0		5
20	Dinas Lingkungan Hidup	51					
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	11	11	0	0		12
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	73	73	0	0		1
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	27	27	0	0		2
24	Dinas Pemuda dan Olahraga	5	5	0	0		
25	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	16	0	0		10
26	Dinas Pendidikan	7					6
27	Dinas Perhubungan	10					
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	42	41	0	1	Disperindag Jabar hanya menginformasikan terkait mekanisme penyaluran minyak goreng	5
29	Dinas Perkebunan	35	32	0	2	Tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Perkebunan	1
30	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	31	31	0	0		3
31	Dinas Perumahan dan Permukiman	7	2				13,5
32	Dinas Sosial	1	1	0	0		12
33	Dinas Sumber Daya Air	36	36	0	0		42
34	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	54	54	0	0		14



0D1C280529

Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

35	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14	14	0	0		
36	Biro Administrasi Pimpinan	0	0	0	0	–	0
37	Biro Badan Usaha Milik Daerah dan Investasi Jawa Barat	0	0	0	0	–	0
38	Biro Kesejahteraan Rakyat	0	0	0	0	–	0
39	Biro Umum	0	0	0	0	–	0
40	Satuan Polisi Pamong Praja	19	4				2
41	PPID Utama	88	88	0	0	–	7
TOTAL		1315	951	0	12	0	4

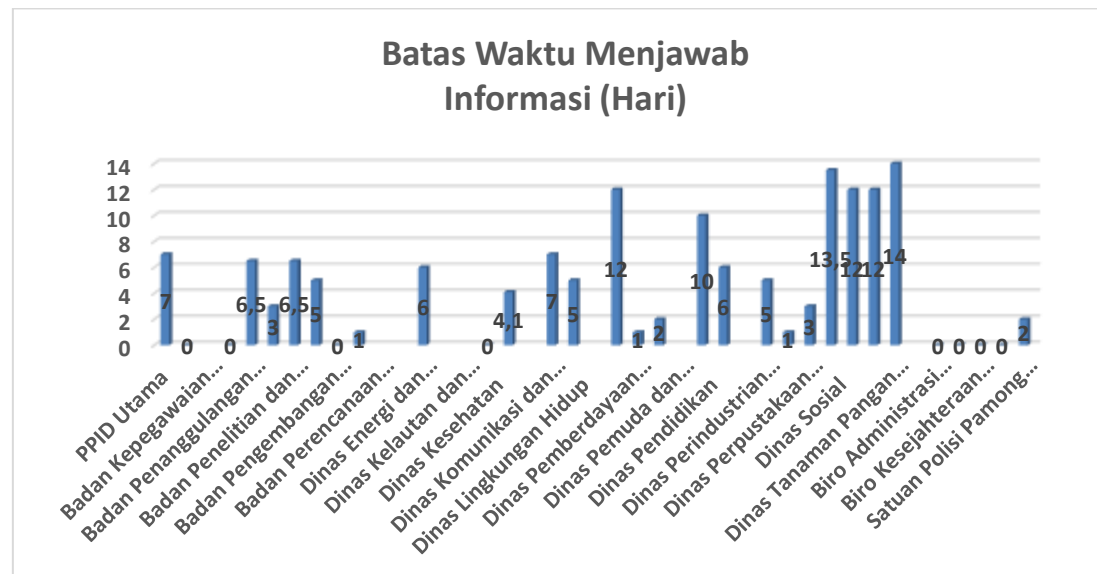
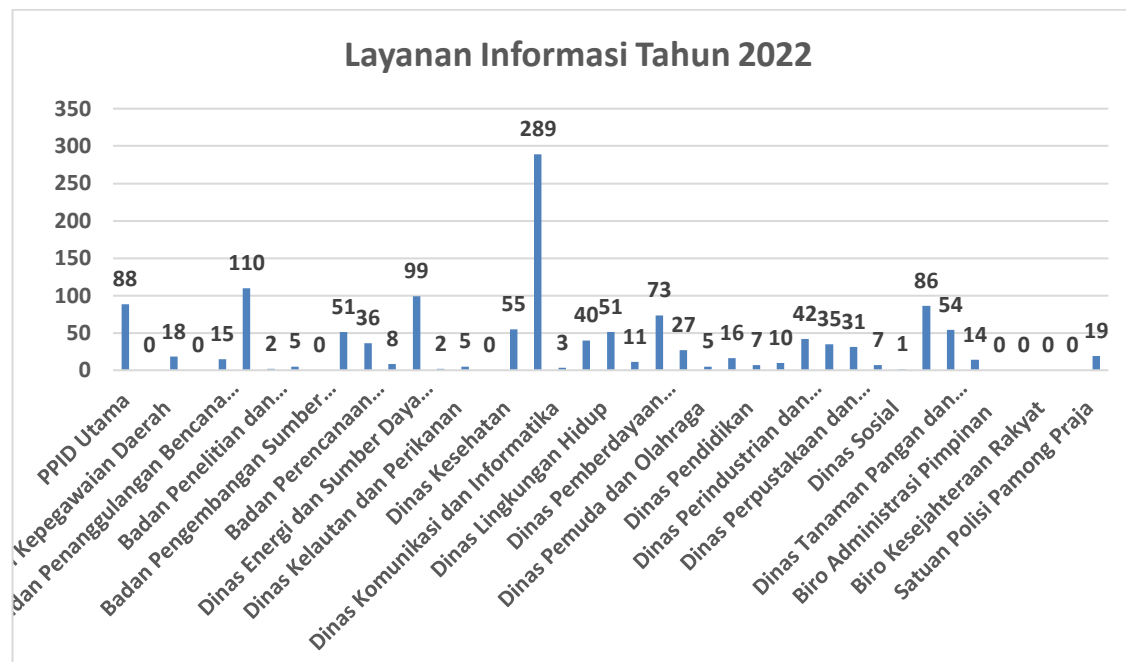
TOTAL

Dari total 46 Perangkat Daerah, sebanyak 40 Perangkat Daerah telah mengirimkan laporan layanan informasi dan dokumentasi publik. Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2022 yaitu sebanyak 1.315 permohonan, dengan rincian 951 Informasi diberikan seluruhnya, 0 informasi diberikan Sebagian dan 12 informasi ditolak dengan alasan data dikuasai pihak lain serta tidak sesuai dengan tupoksi. Ratas Jawaban Permohonan Informasi yaitu 4 hari kerja.



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

No	Nama BUMD	Jumlah Permohonan	Permohonan			Alasan Ditolak	Ratas Waktu Jawab
			Diberikan	Sebagian	Ditolak		
1	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH	0	0	0	0	—	—
2	PT JASA DAN KEPARIWISATAAN	10	0	10	0	—	12
3	PT JASA SARANA	4	0	0	2	Proyek masih dalam tahap inisiasi	—
4	PT TIRTA GEMAH RIPAH	1	1	0	0	—	14
5	PT AGRONESIA	0	0	0	0	—	—
6	PT MIGAS UTAMA JABAR	0	0	0	0	—	—
7	PT MIGAS HILIR JABAR	0	0	0	0	—	—
8	PT BANDAR UDARA INTERNASIONAL	21	6	0	0	—	1
9	PT AGRO JABAR	5	0	5	0	—	1
10	PD AGRIBISNIS DAN PERTAMBANGAN	0	0	0	0	—	—
11	PT JAMKRIDA JABAR	0	0	0	0	—	—
12	PT BPR INTAN JABAR KAB GARUT	0	0	0	0	—	—
13	PT BPR KARYA UTAMA KAB SUBANG	0	0	0	0	—	—
14	PT BPR CIANJUR KAB CIANJUR	0	0	0	0	—	—
15	PT BPR CIPATUJAH KAB TASIK	0	0	0	0	—	—
16	PT BPR WIDAYA MUKTI KAB BEKASI	0	0	0	0	—	—
17	BPR ARTA GALKUH MANIDIRI CIAMIS	0	0	0	0	—	—



0D1C280529

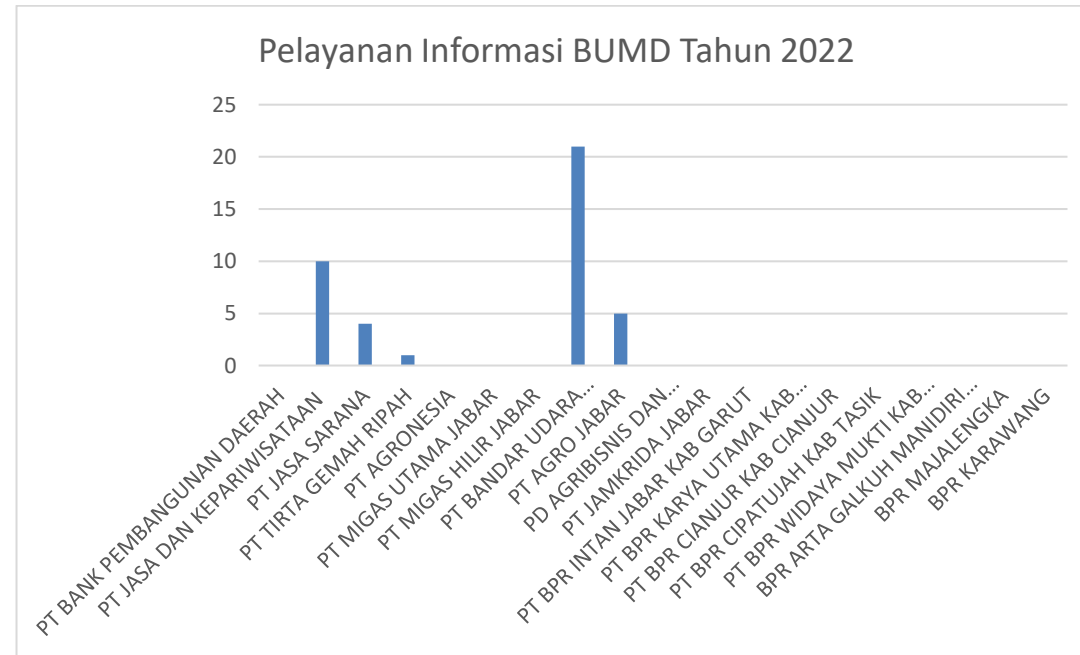
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

18	BPR MAJALENGKA	0	0	0	0	—	—
19	BPR KARAWANG	0	0	0	0	—	—
20	PD BPR PK BALONGAN INDRAMAYU	0	0	0	0	—	—
21	PD BPR - PK PARUNG PANJANG BOGOR	0	0	0	0	—	—
22	BPR CIREBON JABAR	0	0	0	0	—	—
TOTAL		41	7	15	2	0	7



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>



TOTAL

Dari total 22 BUMD, sebanyak 4 BUMD telah mengumpulkan laporan layanan informasi dan dokumentasi publik. Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2022 sebanyak 41 permohonan dengan rincian, 7 informasi diberikan seluruhnya, 15 informasi diberikan sebagian, dan 2 informasi ditolak dengan alasan proyek masih dalam tahap inisiasi. Ratas Jawaban Permohonan Informasi yaitu 7 hari kerja.



0D1C280529

Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2022 capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berada di peringkat pertama tertinggi se-Indonesia dengan nilai 81,93 poin. Nilai tersebut di atas rata-rata nasional, yakni 74,43 poin. Hal tersebut diraih berkat kolaborasi dan inovasi seluruh *stakeholder* dalam menyelenggarakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Barat. Oleh karena itu, perlu terus kita pertahankan capaian terbaik ini dengan menjaga kualitas pelayanan informasi serta meningkatkannya melalui inovasi.

Sejalan dengan capaian IKIP, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat juga berhasil meraih Predikat Informatif dengan poin 98,85 atau terbaik kedua se-Indonesia untuk kategori Pemerintah Provinsi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022. Sebelumnya di tahun 2021, Provinsi Jawa Barat berada di peringkat ke 14. Hal tersebut merupakan peningkatan pesat dari pelayanan informasi yang diselenggarakan oleh PPID Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini harus dipertahankan dan perlu ditingkatkan agar Provinsi Jawa Barat dapat terus menjadi Provinsi yang Informatif terbaik pertama seperti capaian IKIP terbaik se-Indonesia.

Selain itu, PPID Utama Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022. Hasil Monitoring dan Evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa PPID Badan Publik di Provinsi Jawa Barat baik PPID Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota hingga BUMD mengalami peningkatan yang baik.

Pada 2021, hanya 18 Badan Publik yang dinyatakan informatif dan mendapatkan penghargaan. Tahun 2022 ini, jumlah tersebut melonjak signifikan menjadi 46 Badan Publik. Hasil Monev Tahun 2021 hanya ada 4 Kabupaten/Kota yang informatif. Kemudian Tahun 2022 meningkat menjadi 13 Kabupaten/Kota yang informatif. Selain itu, untuk Kategori Perangkat Daerah, yang tadinya hanya ada 8 OPD yang informatif, sekarang menjadi 17 OPD yang informatif.

Kami sepenuhnya menyadari bahwa kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik masih perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan. Dalam perjalanannya, pelayanan informasi kepada publik sering terhambat disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan informasi publik di masing-masing Badan Publik baik PPID Perangkat Daerah, Kabupaten/Kota maupun BUMD. Hal tersebut tercermin dalam proses pengumpulan Daftar Informasi Publik (DIP) dan proses penyusunan usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) dari masing-masing Perangkat Daerah.



PPID pada Perangkat Daerah belum secara utuh memahami bagaimana memilah jenis informasi yang dikuasai serta melakukan Uji Konsekuensi agar tersusun DIP dan usulan DIK yang benar-benar berkualitas. Selain itu, kami menemukan bahwa sebagian PPID pada Perangkat Daerah masih belum memahami bagaimana menyikapi permohonan informasi dari individu/kelompok masyarakat yang mengaku mewakili Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers. Tidak jarang para pemohon informasi meminta dokumen informasi dengan tujuan melaksanakan fungsi pengawasan publik.

PPID sering kebingungan untuk menyikapi permohonan informasi karena khawatir dengan kredibilitas pemohon, baik dalam hal pribadi pemohonnya, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Perusahaan Pers yang diwakilinya, maupun tujuan permohonan dan penggunaan informasi publiknya. Hal-hal lain yang menjadi hambatan kami diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi antara PPID Utama dan PPID Pelaksana masih sering terhambat, sehingga seringkali proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak berjalan sesuai standar, misalnya dalam proses penyusunan Daftar Informasi Publik dan usulan Informasi yang Dikecualikan, serta proses koordinasi pelayanan permohonan informasi;
2. Jumlah SDM yang terbatas disertai beban tugas ganda, terlebih Pejabat Fungsional Pranata Kehumasan, Komputer dan Arsiparis pada Perangkat Daerah masih minim; dan
3. Rotasi Jabatan tanpa adanya *transfer of knowledge*, sehingga pemahaman pejabat struktural yang membidangi PPID saat terjadi penggantian masih sangat minim.
4. Revisi regulasi PPID khususnya Keputusan Gubernur Nomor 067/Kep.225-Diskominfo/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Reformasi Birokrasi dan perubahan nomenklatur serta penyesuaian struktur organisasi.

Regulasi tersebut diharapkan dapat mendorong PPID pada Perangkat Daerah untuk menunjuk PPID di setiap Unit/Balai/Cabang Dinas pada Perangkat Daerah. Penunjukan PPID pada unit kerja yang memberikan pelayanan langsung di daerah dimaksudkan agar proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik di seluruh unit kerja dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana sesuai dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.



Rekomendasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

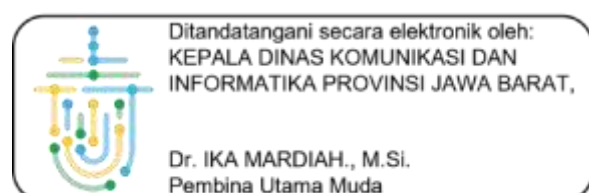
Berdasarkan tantangan dan hambatan tersebut di atas, kami merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pelayanan permohonan informasi publik serta Pelayanan Informasi yang ramah disabilitas.
2. Rapat koordinasi berkala dengan agenda kegiatan yang beragam, misalnya *work shop*, *Training of Trainers (ToT)*, seminar, bimbingan teknis dan lain sebagainya;
3. Berkenaan dengan peran pengawasan dan pembinaan terhadap PPID Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PPID Utama Provinsi Jawa Barat perlu memperkuat Forum Koordinasi PPID Pemerintah Daerah di Jawa Barat.
4. Reformasi Birokrasi dan perubahan nomenklatur serta penyesuaian struktur organisasi menjadi latar belakang utama perlunya pemutakhiran dan penyesuaian. Oleh karena itu, penyusunan regulasi untuk pemutakhiran Keputusan Gubernur tentang PPID dan SOP (Standar Operasional Prosedur) menjadi agenda penting PPID Utama di Tahun 2023.

Penutup

Demikian Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) PPID Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2022 ini Kami susun. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kami di tahun yang akan datang untuk terus berinovasi meningkatkan Pelayanan Informasi dan terus mempertahankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang Informatif.

Bandung, Januari 2023
Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Provinsi Jawa Barat
Selaku
PPID Utama Provinsi Jawa Barat,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

0D1C280529



0D1C280529

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan menindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/0D1C280529>

Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) Tahun 2022